



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI DAN PROSPEK 2025

SRI PURWANTI
Analis Kebijakan Ahli Muda
Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal

Jakarta, 17 Oktober 2024



KARAKTER INFLASI INDONESIA

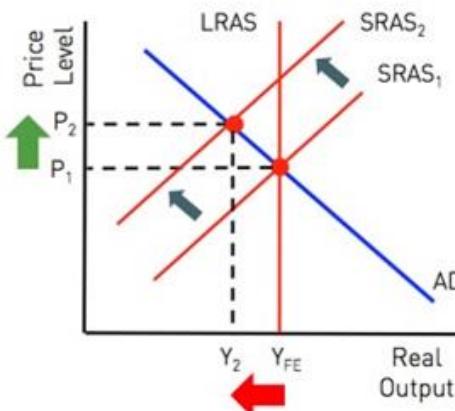
INFLASI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Disagregasi Inflasi

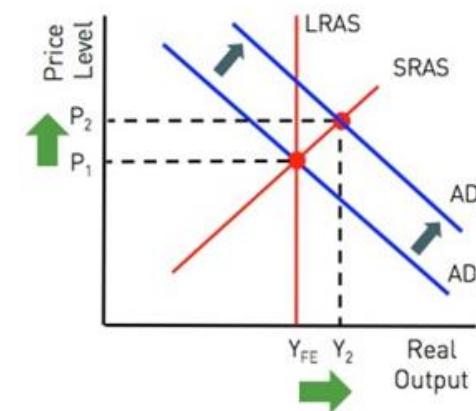
- Inflasi Komponen Inti: komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti Interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditas internasional), dan ekspektasi inflasi.
- Inflasi Komponen Harga Diatur Pemerintah (*Administered Prices*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.
- Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

Determinan Inflasi



Cost push inflation

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply*. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditas yang diatur pemerintah dan terjadi negative *supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.



Demand pull inflation

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *demand*. Faktor penyebab *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau *aggregate demand* lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.

INFLASI DIPENGARUHI SISI SUPPLY TERUTAMA VOLATILE FOOD



Inflasi di negara berkembang termasuk Indonesia, lebih dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari **sisi penawaran** terutama pada **komponen makanan (volatile food)** yang diakibatkan antara lain oleh adanya **gangguan pada sisi produksi seperti gagal panen, cuaca (curah hujan tinggi, banjir), maupun kenaikan harga pangan dunia.**

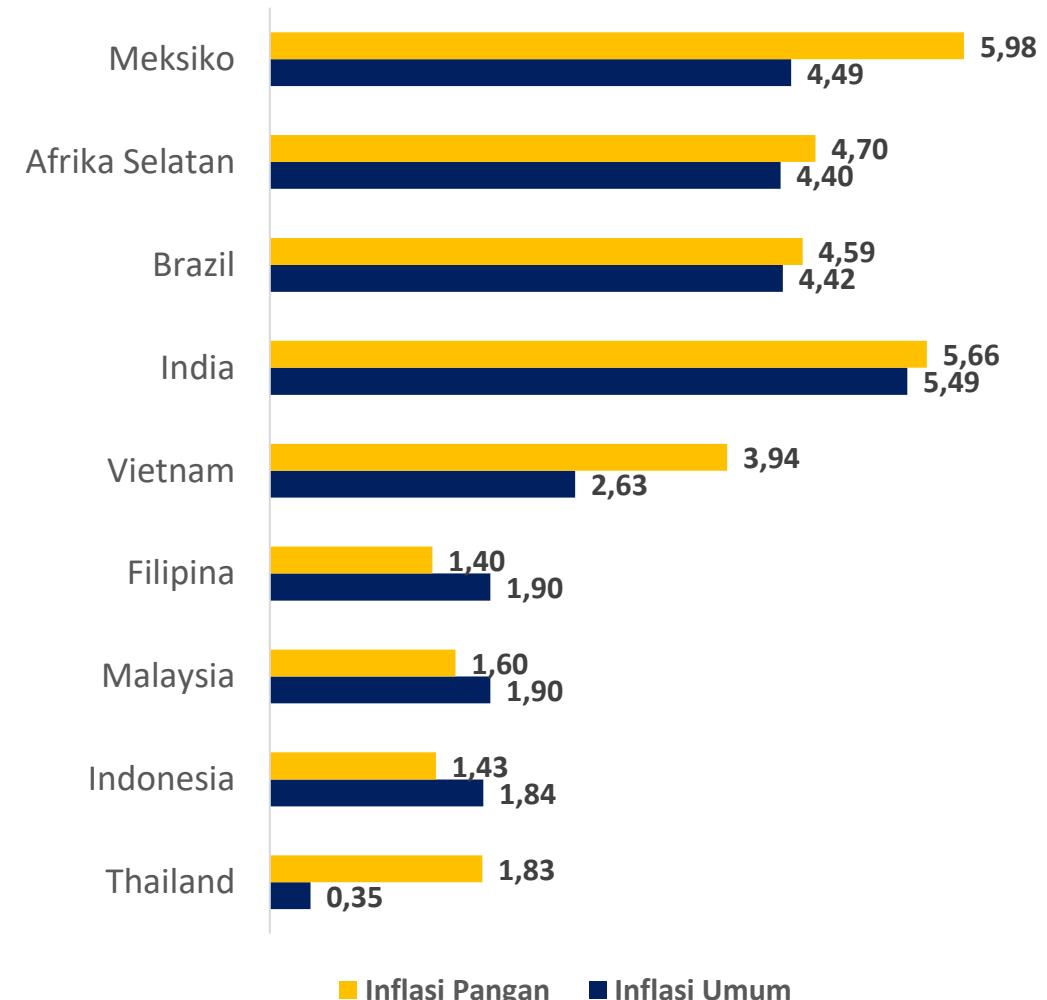


Oleh karena itu, selain **kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal dan moneter** untuk menjaga inflasi pada kisaran sasarnya, diperlukan juga **intervensi kebijakan hingga level daerah.**



Implementasi atas kebijakan pangan terutama dari sisi produksi sangat tergantung **sinergi dengan daerah**, sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi nasional, **koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Bank Indonesia** menjadi keharusan. Hal ini tertuang dalam Keppres 23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN)

Inflasi Negara Berkembang (% yoy)



Sumber: Trading Economics



www.ekon.go.id



PerekonomianRI



PerekonomianRI



PerekonomianRI



PerekonomianRI

INFLASI BERKAITAN SECARA LANGSUNG TERHADAP KEMISKINAN

Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Porsi konsumsi bahan makanan oleh masyarakat berpendapatan rendah lebih besar dibandingkan porsi komoditas lainnya.

Pengeluaran RT Miskin

25,79% Non- makanan	No	Komoditas	Kontribusi terhadap Garis Kemiskinan Maret 2023 (%)	
			Desa	Kota
	1	Beras	23,73	19,35
	2	Rokok kretek filter	11,34	12,14
	3	Telur ayam ras	3,34	4,22
	4	Daging ayam ras	2,93	4,53
	5	Gula pasir	1,69	2,35
	6	Mie Instan	2,56	2,24
	7	Bawang merah	1,90	2,12
	8	Cabe rawit	1,84	-
	9	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,87	2,00
	10	Kue basah	1,76	1,85
	11	Roti	1,86	1,95

Sumber: BPS

Kelompok dan Subkelompok	Konsumsi/tahun (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Desil										
Bahan Makanan	38%	34%	30%	28%	26%	24%	22%	20%	18%	10%
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	20%	21%	21%	21%	21%	20%	19%	19%	18%	13%
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	11%	13%	13%	13%	13%	14%	14%	15%	15%	14%
Sandang	4%	4%	4%	5%	5%	5%	6%	6%	7%	9%
Kesehatan	12%	12%	13%	13%	13%	14%	14%	14%	14%	13%
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	8%	11%
Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	9%	10%	13%	15%	16%	17%	18%	20%	20%	30%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Susenas Maret 2020

Pengendalian inflasi sangat berkaitan erat dengan usaha penanggulangan kemiskinan, khususnya pengendalian inflasi bahan makanan karena porsi konsumsi bahan makanan masyarakat berpendapatan rendah lebih besar dibandingkan porsi konsumsi non makanan.

BOBOT BEBERAPA KOMODITAS PANGAN STRATEGIS MENINGKAT PADA SBH 2022

Bobot Disagregasi Inflasi SBH 2022

65,06%

Inti

19,17%

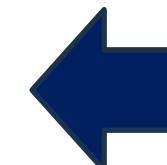
Administered
Price

15,77%

Volatile
Food

Pengendalian Inflasi Kab/Kota IHK Baru Menjadi Tantangan

Perbedaan signifikan antara pola konsumsi
90 Kota Lama dengan 60 Kabupaten
Tambahan terletak pada kelompok **Makanan,
Minuman, dan Tembakau**



SBH 2018

No	Komoditas	Bobot (%)
1	Sewa Rumah	4,66
2	Kontrak Rumah	4,60
3	Tarif Listrik	3,96
4	Bensin	3,78
5	Beras	3,33
6	Biaya Pulsa Ponsel	2,54
7	Akademi/Perguruan Tinggi	2,07
8	Mobil	2,01
9	Nasi Dengan Lauk	1,87
10	Bahan Bakar Rumah Tangga	1,85
11	Upah Asisten Rumah Tangga	1,85
12	Tarif Air Minum PDAM	1,84
13	Rokok Kretek Filter	1,45
14	Daging Ayam Ras	1,37
15	Tukang Bukan Mandor	1,15
16	Air Kemasan	1,14
17	Sekolah Dasar	1,01
18	Angkutan Udara	0,94
19	Biaya Langganan Internet	0,91
20	Sekolah Menengah Atas	0,88

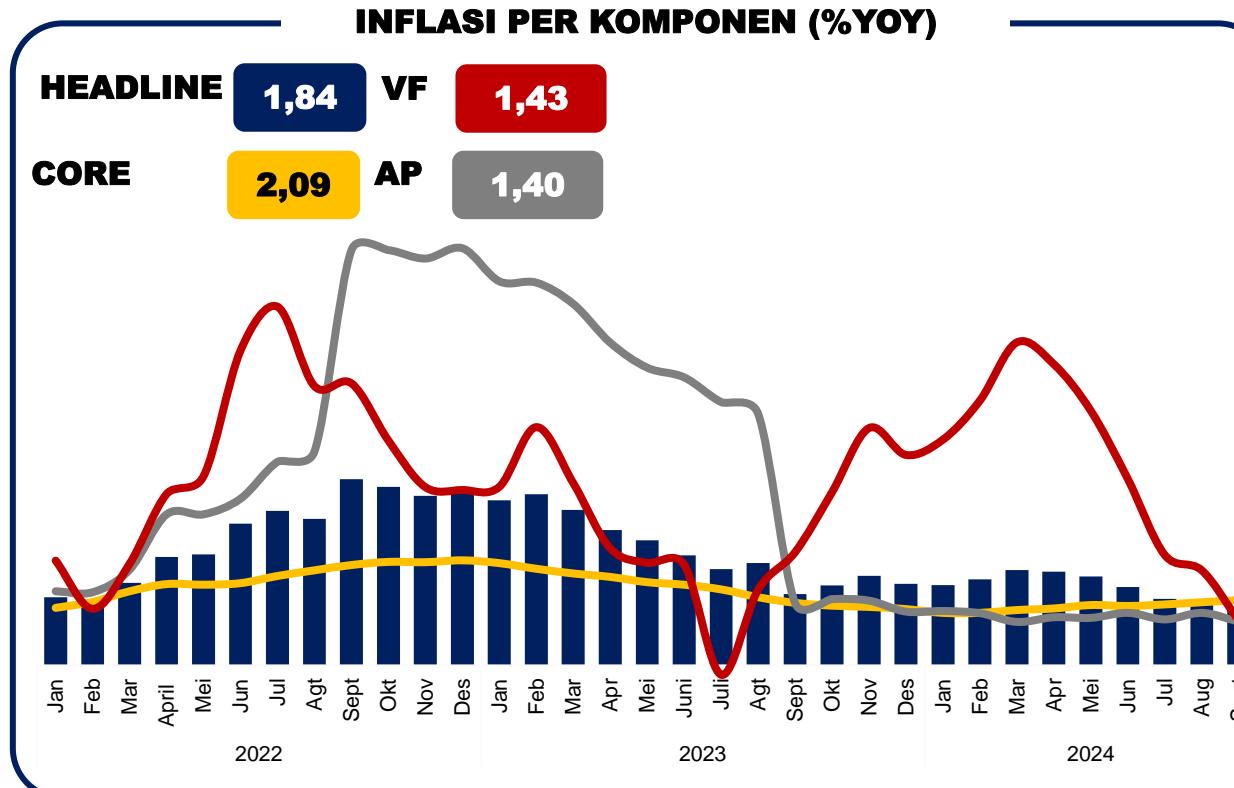
SBH 2022

No	Komoditas	Bobot (%)
1	Tarif Listrik	4,88
2	Bensin	4,43
3	Beras	3,48
4	Kontrak Rumah	3,29
5	Sewa Rumah	2,96
6	Nasi Dengan Lauk	2,31
7	Biaya Langganan Internet	2,31
8	Akademi/Perguruan Tinggi	2,16
9	Sigaret Kretek Mesin (Skm)	1,90
10	Bahan Bakar Rumah Tangga	1,79
11	Mobil	1,78
12	Tarif Pulsa Ponsel	1,71
13	Daging Ayam Ras	1,59
14	Tarif Air Minum Pam	1,49
15	Upah Asisten Rumah Tangga	1,35
16	Minyak Goreng	1,32
17	Air Kemasan	1,07
18	Sepeda Motor	1,02
19	Emas Perhiasan	0,95
20	Telur Ayam Ras	0,94

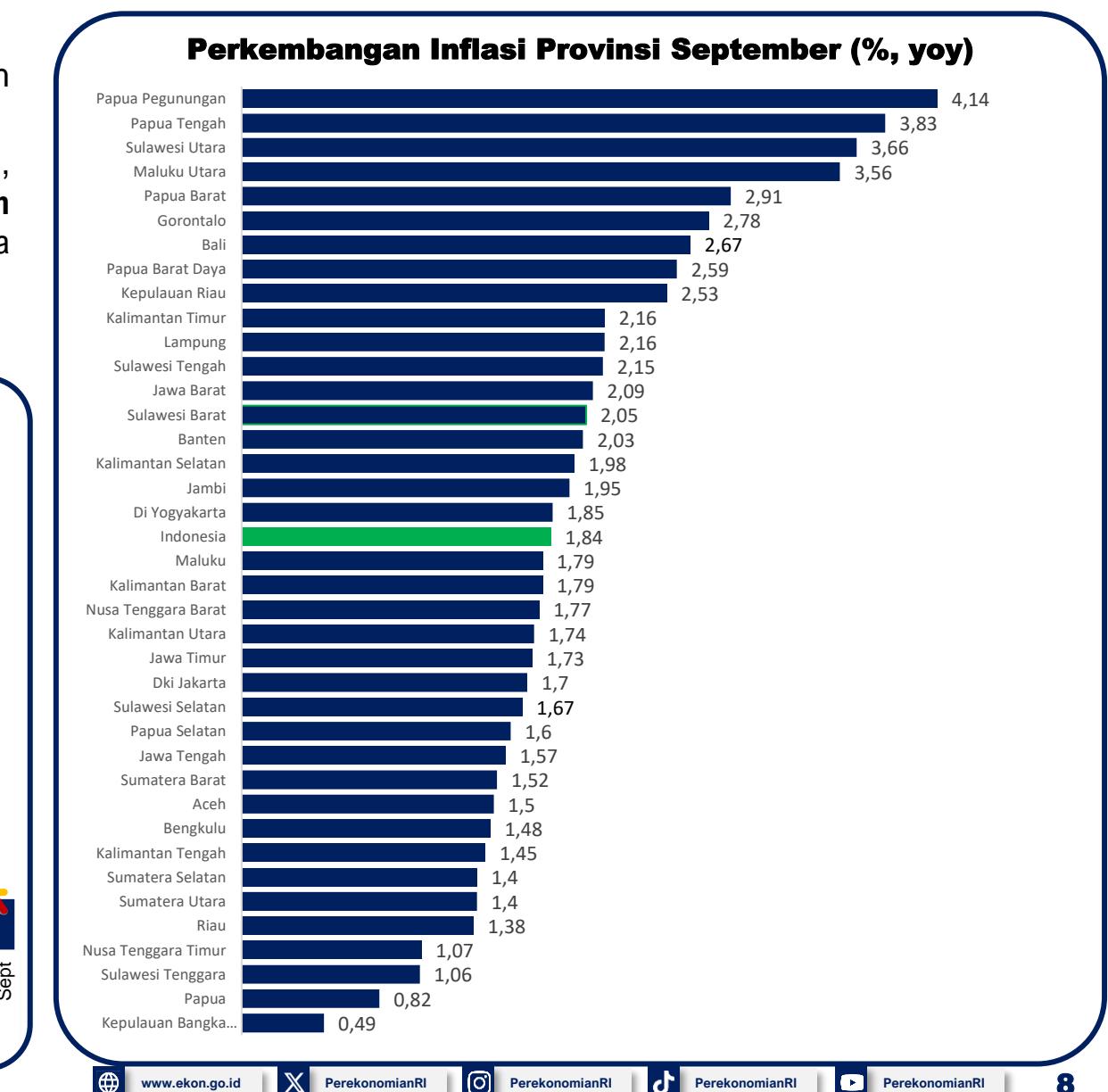
PERKEMBANGAN & STRATEGI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

INFLASI SEPTEMBER 2024 TERKENDALI, MAYORITAS INFLASI SECARA SPASIAL BERADA DI KISARAN TARGET NASIONAL

- Inflasi September 2024 tercatat sebesar 1,84% (yoY), tetap terjaga dalam rentang sasaran $2,5\pm1\%$.
- Inflasi Diatur Pemerintah (*Administered Price/AP*) terkendali pada level 1,40% (yoY), inflasi inti (*core*) meningkat menjadi 2,09% (yoY), sementara **inflasi Pangan Bergejolak (*Volatile Food/VF*) kembali menurun ke 1,43% (yoY)**. Penurunan harga berbagai komoditas pangan mendorong penurunan inflasi VF.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)



KOORDINASI DAN SINERGI KEBIJAKAN UNTUK MEMASTIKAN INFLASI TETAP TERKENDALI

Pemerintah (pusat dan daerah) dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui TPIP-TPID dalam upaya pengendalian inflasi di tengah tekanan global. Dengan berbagai upaya ini, **Pemerintah optimis inflasi 2024-2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran $2,5\pm1\%$.**



KEBIJAKAN MONETER

Dukungan kebijakan moneter *pro-stability* dan *pro growth*

- Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDf), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
- Operasi moneter termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI);



KEBIJAKAN FISKAL

Optimalisasi APBN dan APBD sebagai *shock absorber*

- Subsidi dan Kompensasi Energi
- Anggaran Ketahanan Pangan termasuk optimalisasi CBP (penyaluran SPHP)
- Program Perlinsos, a.l bantuan pangan
- Alokasi IF pengendalian inflasi daerah
- Fasilitasi distribusi pangan
- Optimalisasi APBD dan BTT

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

K1

Keterjangkauan Harga



- Peningkatan pelaksanaan operasi pasar murah/gerakan pangan mudah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
- Bantuan pangan, perlinsos, subsidi dan kompensasi energi

K2

Ketersediaan Pasokan



- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
- Akses pembiayaan KUR dan Kredit Alsintan
- Penyediaan pupuk bersubsidi

K3

Kelancaran Distribusi



- Fasilitasi distribusi komoditas pangan startegis
- Optimalisasi program tol laut untuk menjangkau daerah 3TP
- Pemberian bantuan biaya logistik

K4

Komunikasi Efektif



- Orkestrasi TPIP untuk upaya pengendalian inflasi daerah oleh Kemendagri melalui rakor mingguan
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi TPIP-TPID per kawasan yang dilaksanakan *back to back* dengan GNPIP.



**INFLASI IHK
 $2,5\pm1\%$**

**INFLASI 2024-2025
TERJAGA SESUAI SASARAN**

HASIL HIGH LEVEL MEETING TPIP 2024

7 Langkah Strategis untuk Konsisten Menjaga Inflasi IHK dalam Kisaran Sasaran $2,5\pm1\%$ pada 2024:

- 1** Melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal, yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- 2** Mengendalikan inflasi kelompok *Volatile Food* agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang;
- 3** Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- 4** Memperkuat ketahanan pangan melalui upaya **peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan**;
- 5** Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;
- 6** Memperkuat sinergi **TPIP-TPID** antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta
- 7** Memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.



ARAHAN PRESIDEN DALAM RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2024

Presiden RI memberikan 5 (lima) arahan kepada TPIP dan TPID pada Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2024 sebagai strategi pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan

1

Memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim

2

Mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (*smart agriculture*).

3

Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian

4

Memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah

5

Memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, di tingkat pusat dan daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi



KONDISI PEREKONOMIAN DIDUKUNG PROSPEK INFLASI 2024 YANG TETAP TERJAGA DALAM KISARAN 2,5+1%

Namun, Pengendalian Inflasi Khususnya Inflasi Pangan Menghadapi Berbagai Tantangan

- Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia akan terus mempekuat kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil untuk memastikan inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam rentang.
- Namun demikian, pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan menghadapi berbagai tantangan. Inflasi pangan dipengaruhi oleh kondisi global baik pasokan maupun cuaca, serta kondisi domestik baik produksi serta distribusi.

Keterbatasan pasokan pangan global dapat memengaruhi pasokan domestik:

- Ketergantungan pasokan CBP terhadap pasokan LN terjadi di seluruh wilayah
- Pasokan beras global terbatas sehingga mendorong kenaikan harga beras global berisiko mengganggu pasokan domestik

Kendala struktural sisi produksi, di tengah upaya perbaikan infrastruktur produksi:

- Penurunan luas lahan dan produktivitas di daerah sentra
- Kesinambungan produksi antarwaktu
- Dukungan ketersediaan faktor produksi (pupuk)

Faktor cuaca memengaruhi produksi antarwaktu:

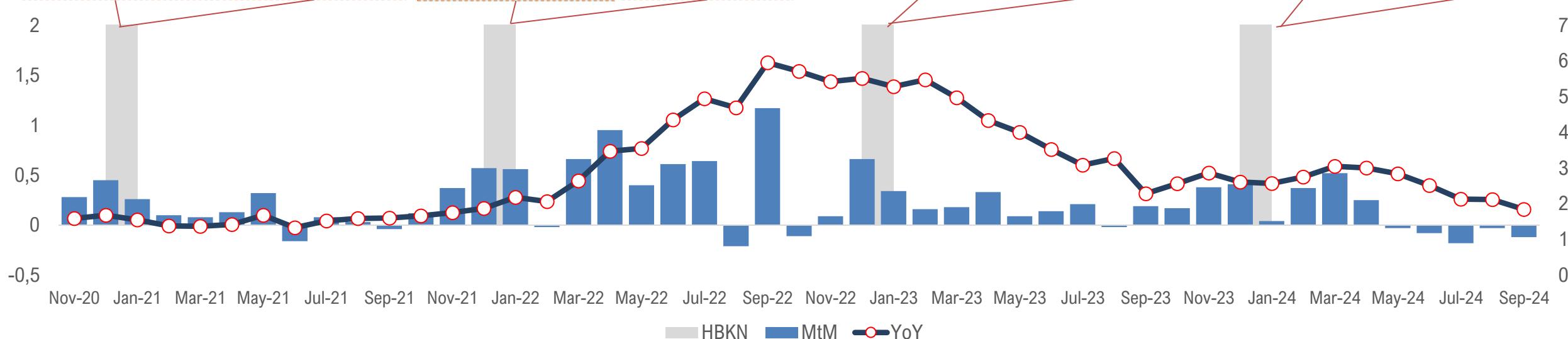
- Produksi komoditas pangan strategis rentan dipengaruhi oleh kondisi cuaca
- Sementara produksi beras 2024 rendah, a.l. akibat el nino tahun sebelumnya
- La nina berpotensi menyebabkan produksi hortikultura tidak optimal karena bersifat perishable

Efisiensi distribusi perdagangan masih belum optimal:

- Margin perdagangan dan pengangkutan (MPPt) pada rantai perdagangan utama di daerah Jawa cenderung lebih tinggi
- Sementara itu, kenaikan inflasi daerah sentra (pengirim) berdampak terhadap kenaikan inflasi daerah penerima

SELAIN PANGAN, PENGENDALIAN TARIF ANGKUTAN YANG LEBIH INTENSIF JUGA DIPERLUKAN PADA HBKN NATAL DAN TAHUN BARU

Des 2020	Jan 2021	Des 2021	Jan 2022	Des 2022	Jan 2023	Des 2023	Jan 2024
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabai merah ▪ Telur ayam ▪ Cabai rawit ▪ Daging ayam ▪ Ikan segar ▪ Angkutan udara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabai rawit ▪ Ikan segar ▪ Tempe ▪ Tahu mentah ▪ Daging ayam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabai rawit ▪ Minyak goreng ▪ Telur ayam ▪ Daging ayam ▪ Cabai merah ▪ Angkutan udara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daging ayam ▪ Ikan segar ▪ Beras ▪ Telur ayam ▪ Tomat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beras ▪ Telur ayam ▪ Daging ayam ▪ Ikan segar ▪ Cabai rawit ▪ Angkutan udara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beras ▪ Cabai merah ▪ Ikan segar ▪ Cabai rawit ▪ Rokok kretek filter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beras ▪ Daging ayam ▪ Cabai merah ▪ Cabai rawit ▪ Bawang merah ▪ Angkutan udara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beras ▪ Tomat ▪ Bawang merah ▪ Bawang putih ▪ Daging ayam ▪ Ikan segar



%mtm	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2020	0,39	0,28	0,10	0,08	0,07	0,18	-0,10	-0,05	-0,05	0,07	0,28	0,45
2021	0,26	0,10	0,08	0,13	0,32	-0,16	0,08	0,03	-0,04	0,12	0,37	0,57
2022	0,56	-0,02	0,66	0,95	0,40	0,61	0,64	-0,21	1,17	-0,11	0,09	0,66
2023	0,34	0,16	0,18	0,33	0,09	0,14	0,21	-0,02	0,19	0,17	0,38	0,41
2024	0,04	0,37	0,52	0,25	-0,03	-0,08	-0,18	-0,03	-0,12			

PENTINGNYA PENYUSUNAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI

Dasar Hukum Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi

TPIP: Kepmenko Perekonomian 148/2017

Pasal 2

(1) Kelompok Kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun ...

a. menyusun peta jalan pengendalian inflasi nasional sebagai rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

TPID: Kepmendagri 500.05-8135/2017

c. Dalam pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas, Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Tujuan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi

- 1 | Menjadi pedoman pengendalian inflasi nasional & daerah ke depan (**jangka menengah**)
- 2 | Menjadi dasar penyusunan program kerja secara periodikal
- 3 | Evaluasi roadmap dan program kerja ke depan akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi
- 4 | Memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan **karakteristik daerah**
- 5 | Mendorong daerah untuk membuat inovasi program

PENYUSUNAN ROADMAP SEBAGAI PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

- Sasaran inflasi tahun 2025-2027 telah ditetapkan sebesar $2,5\pm1\%$ untuk masing-masing tahun melalui PMK 31 tahun 2024.
- Angka sasaran inflasi tahun 2025-2027 akan menjadi acuan dalam perumusan program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.

Sasaran Inflasi 2025-2027



ditetapkan $2,5\pm1\%$
(masing-masing tahun)



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
SASARAN INFLASI TAHUN 2025, TAHUN 2026, DAN TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter;

b. bahwa koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a di antaranya dilakukan dengan menciptakan bauran kebijakan moneter dan fiskal melalui penetapan sasaran inflasi dalam 3 (tiga) tahun mendatang;

c. bahwa penetapan sasaran inflasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan untuk mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang stabil dan rendah guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan;

d. bahwa sasaran inflasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi acuan bagi penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

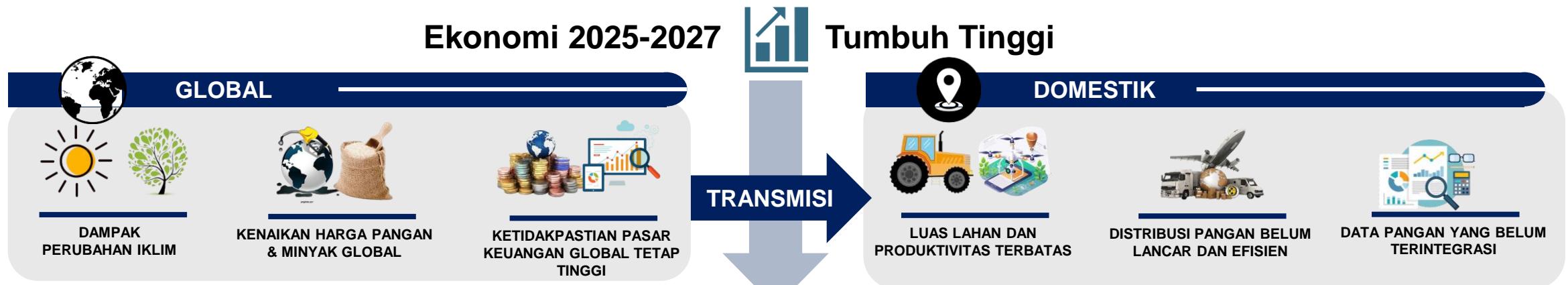
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf



Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027



PENYUSUNAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025-2027 UNTUK MENJAWAB TANTANGAN PENGENDALIAN INFLASI JANGKA MENENGAH



TEKANAN INFLASI PANGAN TINGGI DI JANGKA MENENGAH DAN DAPAT MERAMBAT KE INFLASI INTI

USULAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2025-2027:

PERBAIKAN STRUKTURAL PASOKAN PANGAN DIDUKUNG OLEH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN PENINGKATAN EFISIENSI RANTAI PASOK UNTUK STABILITAS INFLASI MENUJU INDONESIA MAJU



END STATE : TERJAGANYA INFLASI DALAM RENTANG SASARAN 2,5+1%



ISU-ISU YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN



KETERJANGKAUAN HARGA

- Fluktuasi harga komoditas pangan
- Penetapan kebijakan *administered price*



KETERSEDIAAN PASOKAN

- Upaya peningkatan produktivitas di tengah penurunan luas lahan
- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah termasuk komoditas selain beras
- Optimalisasi bantuan/subsidi terkait sarana dan prasarana pertanian
- Penguatan kelembagaan dan kapasitas petani
- Perlunya peningkatan akses pembiayaan bagi petani



KELANCARAN DISTRIBUSI

- Disparitas harga antarwilayah masih relative tinggi
- Penguatan infrastruktur penunjang jalur distribusi



KOMUNIKASI EFEKTIF

- Penyediaan sistem informasi data harga dan pasokan pangan yang terintegrasi
- Penguatan sinergi dan koordinasi antarlembaga di tingkat pusat dan daerah
- Peningkatan tingkat kehandalan TPID melalui *capacity building*

PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Teknologi berperan strategis dalam peningkatan produksi maupun produktivitas pertanian baik dalam hal inovasi budidaya maupun pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi informasi (pertanian berbasis *Internet of Things*)

INOVASI BUDIDAYA PERTANIAN al:

1 Implementasi smart greenhouse (SGH) dalam proses pembibitan

2 Penggunaan bibit unggul, spt *True Shallot Seed* (TSS)

3 Pertanian organik (penggunaan Pupuk organik)

4 Impementasi *System rice intensification* (pola jarak tanam)

5 Padi apung untuk lahan rawa

INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN DAN DIGITALISASI al:

1 *Smart irrigation* untuk irigasi presisi

2 Penggunaan sensor cuaca dapat dimanfaatkan untuk Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

3 Pengukuran PH tanah untuk pemupukan presisi

4 Tambahan irigasi dengan pompanisasi

5 Pemanfaatan alsintan modern (*rice transplanter, rotavator, combine harvester*)



Dukungan Utama:



Pemerataan akses dan infomasi



Pelatihan dan pendampingan SDM yang terlatih



Akses Pembiayaan (KUR dan Kredit Usaha Alsintan)

PERLUNYA PENYUSUNAN NERACA PANGAN NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

- Daerah surplus dan defisit dalam konteks produksi dan konsumsi
- Impor dan ekspor -> alur masuk dan alur keluar komoditas di daerah masing-masing
- Peran KAD dalam alur masuk dan keluar komoditas

Uraian	Keterangan	Beras	Jagung	Kedelai	Bawang Merah	Bawang Putih	Cabai Besar	TON
Stok Awal 2024	A	4.134.399 ^{a)}	956.330 ^{a)}	185.343 ^{b)}	26.377 ^{b)}	50.606 ^{b)}	52.898 ^{b)}	
Susut/Tercecer	B	-	-	-	153.798	13.619	345.023	
Perkiraan Produksi DN 2024	C	30.861.415	14.064.925	181.287	1.384.960	23.055	1.324.985	
Realisasi Impor Jan-Mei 2024	D	2.756.792	915.603	1.670.321	-	278.819	-	
Rencana Impor Jun-Des 2024	E	1.596.016	1.051.423	763.041	-	386.206	-	
Realisasi Ekspor Jan-Mei 2024	F	-	41.217	1.597	2.850,47	13,77	-	
Rencana Ekspor Jun-Des 2024	G	-	-	836	-	0	-	
Total Ketersediaan	H=A-B+C+D+E-F-G	39.348.623	16.947.064	2.797.557	1.254.688	725.053	1.032.861	
Kebutuhan Tahunan	I	31.214.805	13.989.087	2.654.506	1.167.318	665.033	988.991	
Kebutuhan Bulanan	J	2.601.234	1.165.757	221.209	97.277	55.419	82.416	
Kebutuhan Harian	K=H/366	85.286	38.222	7.253	3.189	1.817	2.702	
Stok Akhir 2024	L= H - I	8.133.817	2.957.978	143.051	87.370	60.019	43.869	
Ketahanan Stok (Hari)	M= L/K	95	77	20	27	33	16	

Uraian	Keterangan	Cabai Rawit	Daging Sapi-Kerbau	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Konsumsi	Minyak Goreng
Stok Awal 2024	A	15.512 ^{b)}	96.756 ^{d)}	122.898 ^{c)}	69.873	953.525	-
Susut/Tercecer	B	403.059	-	-	-	-	-
Perkiraan Produksi DN 2024	C	1.393.558	488.959	3.836.764	6.337.254	2.537.885	-
Realisasi Impor Jan-Mei 2024	D	-	76.989	-	-	453.628	-
Rencana Impor Jun-Des 2024	E	-	291.789	-	-	309.369	-
Realisasi Ekspor Jan-Mei 2024	F	-	-	-	-	-	-
Rencana Ekspor Jun-Des 2024	G	-	-	-	-	-	-
Total Ketersediaan	H=A-B+C+D+E-F-G	1.006.011	954.493	3.959.662	6.407.127	4.254.407	5.825.894
Kebutuhan Tahunan	I	981.383	774.410	3.719.718	6.238.954	2.933.386	5.489.076
Kebutuhan Bulanan	J	81.782	64.534	309.977	519.913	244.449	457.423
Kebutuhan Harian	K=H/366	2.681	2.116	10.163	17.046	8.015	14.997
Stok Akhir 2024	L= H - I	24.628	180.082	239.944	168.172	1.321.020	336.818
Ketahanan Stok (Hari)	M= L/K	9	85	24	10	165	22

Sumber : Badan Pangan Nasional Update 23 Agustus 2024 dan disampaikan dalam Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi 7 Oktober 2024



KORPORASI PETANI, INTEGRASI DATA PANGAN, PENINGKATAN PERAN BUMD DAN KERJASAMA ANTARDAERAH

KORPORASI PETANI



- Mendorong para petani berkelompok dalam mengusahakan budidaya pertaniannya
- Budidaya dengan sarpras pertanian modern → teknologi pertanian
- Dilakukan dengan manajemen yang modern
- Pengelolaan pasca panen dan hilirisasi produk untuk nilai tambah
- Kepastian nilai jual (**standby buyer** dan pemasaran)
- Kemudahan **akses pembiayaan** → KUR Pertanian dan Kredit Alsintan dll
- Pendampingan dari pemda



Skala ekonomi yang efisien → harga jual bersaing → **kesejahteraan petani**



Kepastian ketersediaan pasokan → harga ditingkat konsumen tidak terlalu tinggi → **stabilitas harga**

INTEGRASI DATA PANGAN



Integrasi data stok real time dan neraca pangan sebagai basis pengambilan kebijakan:

- Strategi pemenuhan kecukupan konsumsi daerah
- Peningkatan produksi/produktivitas pertanian
- Perluasan pasar (untuk daerah surplus)
- Penguatan kerjasama antardaerah (KAD)
- Intervensi pasar

PENGUATAN BADAN USAHA DAERAH

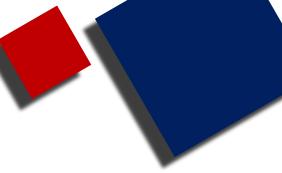


BUMD pangan dapat berperan sebagai **stabilizer pasokan** dan **harga pangan** baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. BUMD/BUMDes juga dapat berperan meningkatkan **efisiensi rantai pasok di daerah**.



KERJASAMA ANTAR DAERAH

Surplus/defisit atas pemenuhan intra provinsi dapat dikerjasamakan dengan daerah/provinsi lain



TERIMA KASIH

